



Katalog BPS: 3101021.82

STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi April 2017

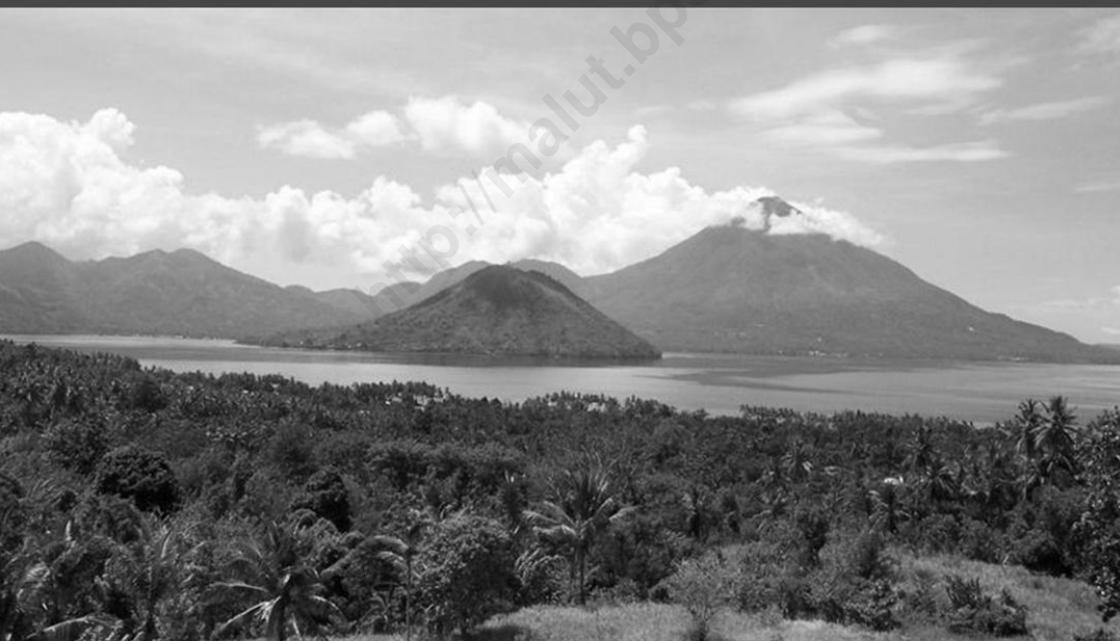


**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

<http://malut.bps.go.id>

STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi April 2017



STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi April 2017

ISBN : 978-602-6755-20-9

No. Publikasi: 82560.1703

Katalog BPS: 3101021.82

Ukuran Buku: 20 x 14 cm

JumlahHalaman: v + 40 halaman

Naskah:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Publikasi Statistik Provinsi Maluku Utara edisi April 2017 merupakan publikasi triwulanan berupa booklet yang berisi data dan informasi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Publikasi ini diterbitkan sebagai ringkasan terhadap data-data statistik yang telah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Maluku Utara, di antaranya yaitu melalui Berita Resmi Statistik.

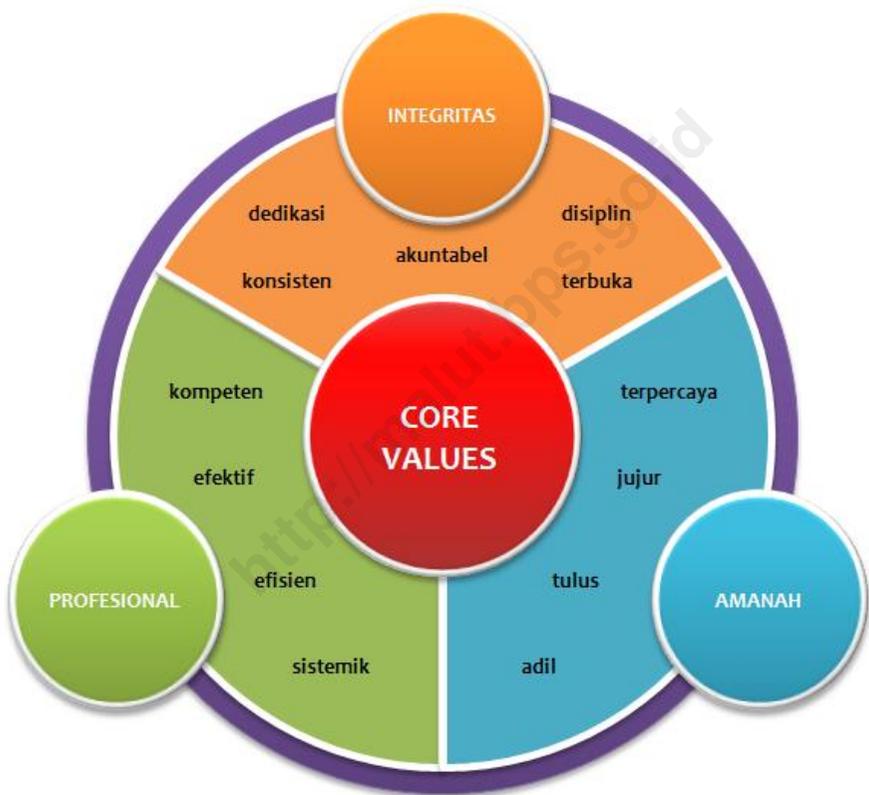
Semoga dengan terbitnya publikasi ini, dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat luas. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini.

Ternate, April 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara

Drs. Misfaruddin, M.Si.

NILAI INTI BPS (BPS Core Values)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Nilai Inti Bps	iv
Daftar Isi	v
Kewilayahan	1
Penduduk	3
Ketenagakerjaan	6
Kemiskinan	10
Gini Ratio	13
Industri Manufaktur	14
Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi	17
Ekspor Dan Impor	19
Nilai Tukar Petani	22
Pariwisata	25
Produk Domestik Regional Bruto	28
Indeks Tendensi Konsumen	34
Indeks Pembangunan Manusia	35
Indeks Pembangunan Gender	38
Indeks Demokrasi Indonesia	39

<http://malut.bps.go.id>

KEWILAYAHAN

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/UPT
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	8	170
Halmahera Tengah	10	63
Kepulauan Sula	12	78
Halmahera Selatan	30	256
Halmahera Utara	17	199
Halmahera Timur	10	104
Pulau Morotai	5	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	7	77
Tidore Kepulauan	8	90
Maluku Utara	115	1.196

Sumber: Direktori Desa Provinsi Maluku Utara Semester 2016

Indikator Kewilayahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Rincian	Persentase
(1)	(2)
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di tepi laut	78,68
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di dalam hutan	2,09
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di sekitar hutan	48,08
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang tidak memiliki SD/MI	8,70
- Persentase kecamatan yang memiliki Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100,00
- Persentase kecamatan yang memiliki pasar dengan bangunan (baik permanen maupun semi permanen)	50,43
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN	65,64
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang belum memiliki penerangan di jalan utama	62,12
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi air	12,71
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi darat	51,00
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air	36,29
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi darat dan memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sepanjang tahun	14,75

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	23,74	48,56	82,75
Halmahera Tengah	26,98	44,81	72,44
Kepulauan Sula	22,01	51,08	81,92
Halmahera Selatan	19,71	61,21	84,79
Halmahera Utara	17,05	47,67	82,04
Halmahera Timur	14,33	48,81	78,43
Pulau Morotai	18,84	52,62	82,69
Pulau Taliabu	32,78	70,17	85,20
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	17,33	44,24	69,70
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

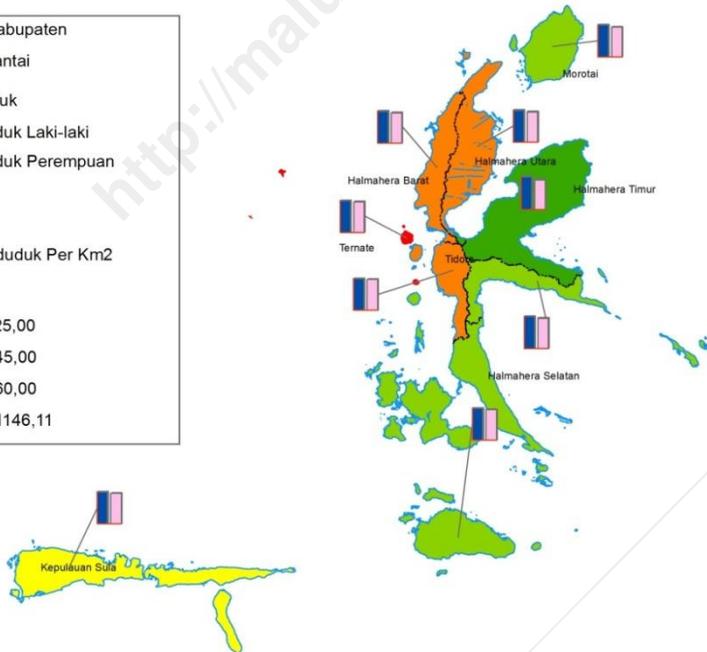
- Beberapa indikator kewilayahan bisa dilihat dari data Pendataan Potensi Desa (Podes).
- Pendataan Podes dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 10 tahun, Podes terakhir yaitu Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014.
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin besar IKG menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi pada wilayah desa tersebut.

PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	104 807	106 791	108 769	110 717	112 722
Halmahera Tengah	45 712	47 079	48 414	49 807	51 315
Kepulauan Sula	89 374	91 406	93 435	95 285	97 177
Halmahera Selatan	207 728	211 682	215 791	219 836	223 460
Halmahera Utara	169 599	173 117	176 573	180 100	183 596
Halmahera Timur	78 112	80 526	82 914	85 188	87 680
Pulau Morotai	55 998	57 565	59 102	60 727	62 412
Pulau Taliabu	48 880	49 510	50 067	50 709	51 316
Ternate	197 566	202 728	207 789	212 997	218 028
Tidore Kepulauan	93 299	94 493	95 813	96 979	98 206
Maluku Utara	1 091 075	1 114 897	1 138 667	1 162 345	1 185 912

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara



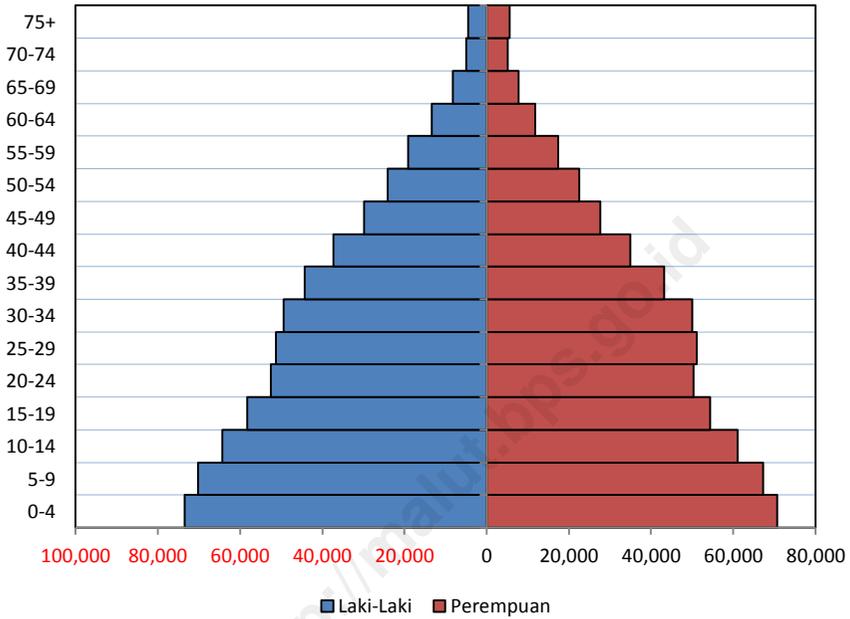
Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	73 458	70 757	144 215
5-9	70 260	67 231	137 491
10-14	64 272	61 057	125 329
15-19	58 302	54 350	112 652
20-24	52 553	50 300	102 853
25-29	51 309	51 056	102 365
30-34	49 334	49 984	99 318
35-39	44 294	43 187	87 481
40-44	37 331	35 016	72 347
45-49	29 898	27 686	57 584
50-54	24 060	22 493	46 553
55-59	19 036	17 387	36 423
60-64	13 310	11 840	25 150
65-69	8 178	7 736	15 914
70-74	4 906	5 096	10 002
75+	4 567	5 668	10 235
Jumlah	605 068	580 844	1 185 912

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

**Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016**



KETENAGAKERJAAN

Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Kegiatan Utama (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	763,3	773,2	782,4	792,5
2. Angkatan Kerja	519,0	513,6	530,7	524,5
Bekerja	490,2	482,5	512,5	503,5
Penganggur	28,8	31,1	18,2	21,0
3. Bukan Angkatan Kerja	244,3	259,6	251,7	268,0
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,99	66,43	67,8	66,2
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56	6,05	3,4	4,0
6. Pekerja tidak penuh	179,5	197,2	179,5	145,7
Setengah Penganggur	76,8	74,0	58,2	36,4
Paruh Waktu	102,7	123,2	121,3	109,3

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu Orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	245,0	242,4	225,2	205,5
2. Pertambangan dan Penggalian	16,6	11,9	20,8	14,0
3. Industri	8,9	17,4	26,4	44,5
4. Listrik, Gas dan Air	0,2	1,2	3,1	3,4
5. Konstruksi	23,0	23,2	25,5	21,8
6. Perdagangan	72,9	63,7	75,2	72,0
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	26,5	31,9	32,5	33,1
8. Keuangan	9,4	6,1	8,1	4,7
9. Jasa Kemasyarakatan	87,9	84,7	95,7	104,5
Jumlah	490,2	482,5	512,5	503,5

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (ribu Orang)

Status Pekerjaan Utama	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	102,2	96,7	103,6	107,3
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	105,8	98,2	113,5	97,4
Berusaha dibantu buruh tetap	14,9	16,3	14,5	19,9
Buruh/karyawan	140,5	135,2	150,9	161,2
Pekerja bebas di pertanian	16,1	14,1	7,8	16,1
Pekerja bebas di non pertanian	14,0	15,9	12,1	12,6
Pekerja keluarga/tak dibayar	96,7	106,1	110,1	88,9
Jumlah	490,2	482,5	512,5	503,5

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Perminggu (ribu Orang)

Jumlah Jam Kerja Perminggu	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 / Sementara Tidak Bekerja	9,7	8,6	14,0	15,1
1 – 7	9,5	8,8	10,8	7,5
8 – 14	24,7	27,3	38,3	28,4
15 – 24	71,9	74,4	64,2	42,9
25 - 34	73,5	86,8	66,2	66,9
0 - 34	189,3	205,9	193,5	160,8
35 +	300,9	276,6	319,0	342,8
Jumlah	490,2	482,5	512,5	503,5

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (ribu Orang)

Tingkat Pendidikan	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD ke bawah	208,8	197,1	192,2	188,1
Sekolah Menengah Pertama	88,9	87,8	88,4	91,2
Sekolah Menengah Atas	113,9	117,7	129,1	131,9
Sekolah Menengah Kejuruan	23,3	20,8	30,1	23,5
Diploma I/II/III	14,4	14,6	16,1	17,6
Universitas	41,0	44,5	56,6	51,2
Jumlah	490,2	482,5	512,5	503,5

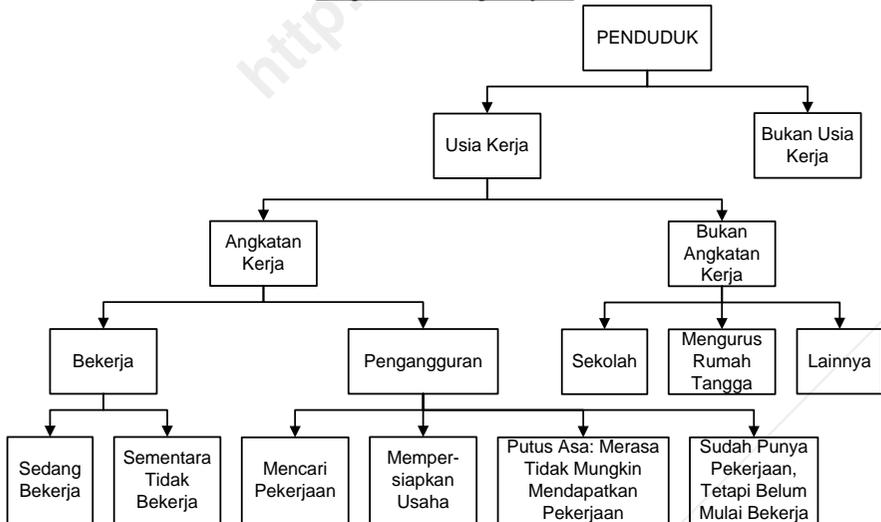
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen)

Tingkat Pendidikan	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD ke bawah	2,25	2,04	1,36	1,79
Sekolah Menengah Pertama	5,12	3,96	0,06	0,46
Sekolah Menengah Atas	8,66	11,00	4,97	5,75
Sekolah Menengah Kejuruan	7,92	11,32	5,55	4,85
Diploma I/II/III	17,64	8,25	13,72	7,17
Universitas	7,55	9,75	7,26	11,44
Jumlah	5,56	6,05	3,43	4,01

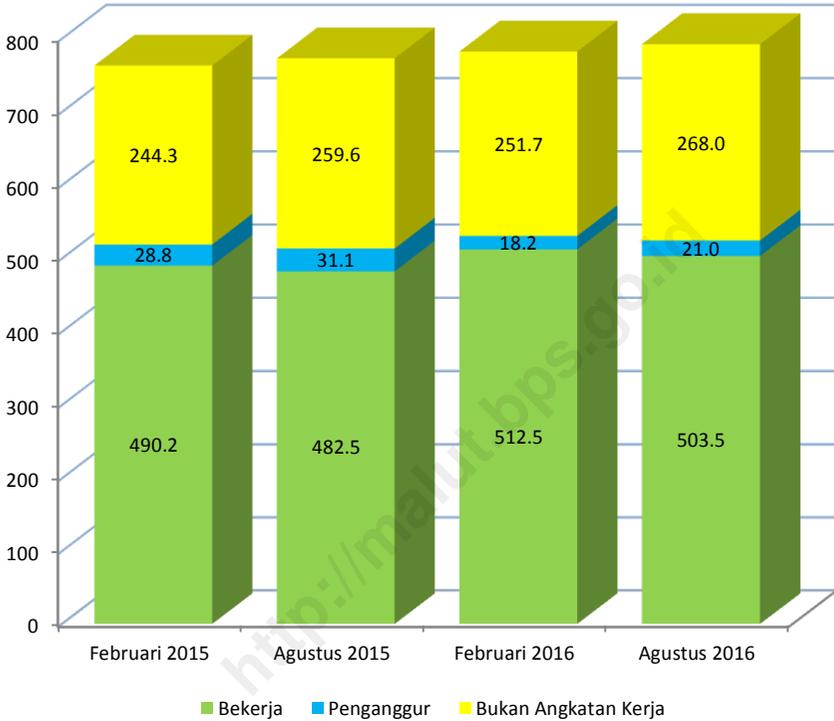
- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
 - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Diagram Ketenagakerjaan



**Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
(ribu orang)**



KEMISKINAN

Jumlah, Komposisi dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mar 2011	8,10	89,33	97,43	2,80	11,58	9,18
Sep 2011	8,57	98,74	107,31	2,95	12,61	10,00
Mar 2012	7,57	84,35	91,91	2,55	10,69	8,47
Sep 2012	8,75	79,62	88,36	2,92	9,98	8,05
Mar 2013	9,16	74,04	83,20	2,99	9,22	7,50
Sep 2013	11,02	74,56	85,58	3,56	9,19	7,64
Mar 2014	12,19	70,45	82,64	3,95	8,56	7,30
Sep 2014	11,17	73,62	84,79	3,58	8,85	7,41
Mar 2015	12,25	67,65	79,90	3,85	7,95	6,84
Sep 2015	8,29	64,35	72,65	2,61	7,57	6,22
Mar 2016	10,58	64,10	74,68	3,32	7,44	6,33
Sep 2016	12,45	63,95	76,40	3,76	7,43	6,41

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			PertumbuhanG K
	K	D	K+D	(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
Mar 2011	251429	215409	225242	5,76
Sep 2011	264367	226299	236590	5,04
Mar 2012	268729	232109	242112	2,33
Sep 2012	276117	240447	250184	3,33
Mar 2013	284374	248026	258060	3,15
Sep 2013	317176	281482	291352	12,90
Mar 2014	321231	286242	295787	1,52
Sep 2014	339561	307374	316160	6,89
Mar 2015	360933	337789	344088	1,52
Sep 2015	378538	356325	362370	6,89
Mar 2016	390 788	371 289	376 554	3,91
Sep 2016	405 368	379 454	386 489	2,64

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mar 2011	0,149	1,497	1,129	0,010	0,280	0,206
Sep 2011	0,473	2,754	2,137	0,109	0,884	0,674
Mar 2012	0,279	1,824	1,402	0,090	0,459	0,359
Sep 2012	0,078	1,135	0,846	0,003	0,196	0,143
Mar 2013	0,314	0,951	0,775	0,046	0,178	0,141
Sep 2013	0,270	1,127	0,890	0,036	0,210	0,162
Mar 2014	0,439	1,351	1,102	0,073	0,327	0,257
Sep 2014	0,398	1,444	1,159	0,074	0,309	0,245
Mar 2015	0,290	0,858	0,703	0,036	0,160	0,126
Sep 2015	0,611	1,348	1,148	0,143	0,320	0,272
Mar 2016	0,367	0,861	0,728	0,064	0,218	0,177
Sep 2016	0,249	1,176	0,918	0,023	0,275	0,205

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

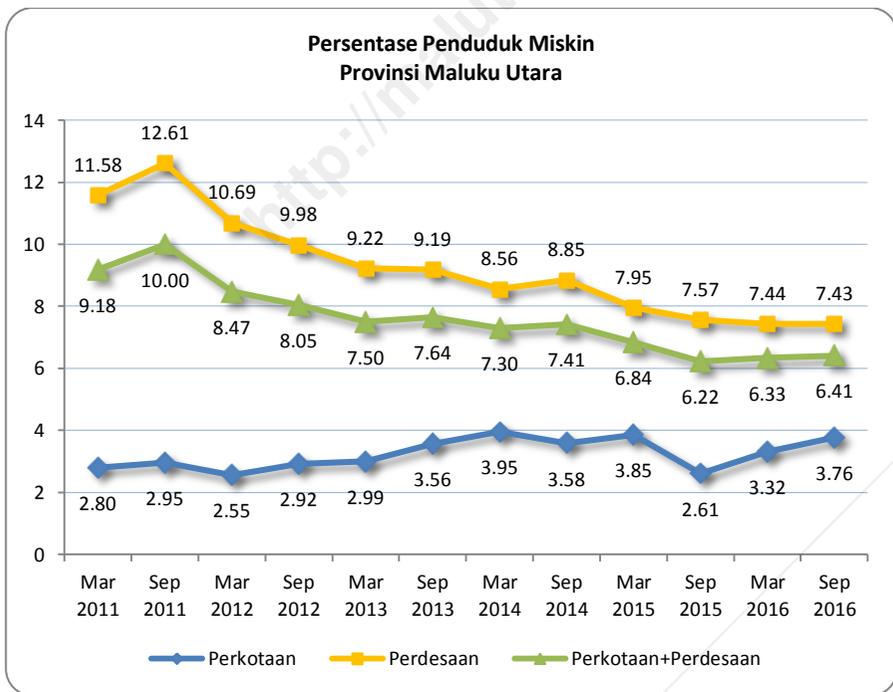
- Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Sumber data yang digunakan adalah data Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap triwulan.
- Metode yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili

oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

- *Head Count Index* mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P_2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).
- Penghitungan penduduk miskin sampai dengan tahun 2010 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tahun 2005.
- Penghitungan penduduk miskin tahun 2011 s.d. 2013 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010).



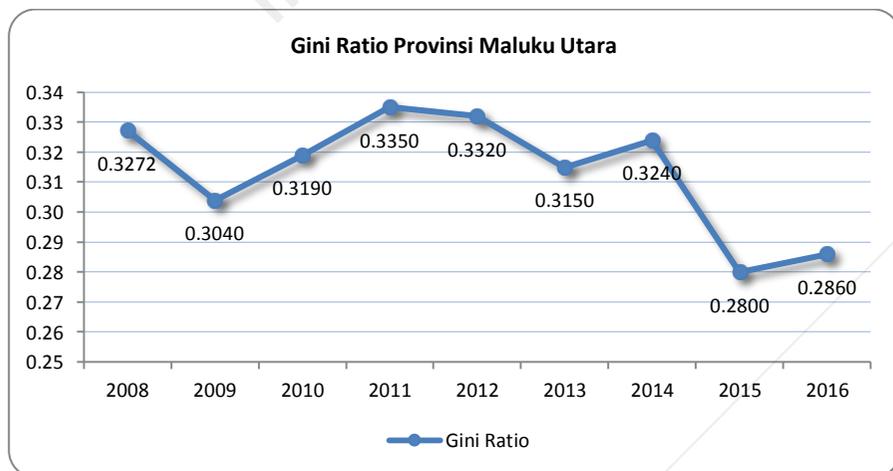
GINI RATIO

Perkembangan Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011*)	2012*)	2013*)	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	0,278	0,311	0,255	0,252	0,223	0,249	0,234	0,258
Halmahera Tengah	0,270	0,261	0,286	0,282	0,257	0,339	0,322	0,265
Kepulauan Sula	0,270	0,326	0,316	0,317	0,267	0,295	0,298	0,262
Halmahera Selatan	0,265	0,285	0,248	0,266	0,274	0,303	0,244	0,209
Halmahera Utara	0,281	0,295	0,283	0,338	0,253	0,312	0,291	0,257
Halmahera Timur	0,226	0,308	0,297	0,261	0,248	0,271	0,264	0,266
Pulau Morotai	-	0,308	0,262	0,287	0,315	0,288	0,269	0,241
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	0,233	0,273
Ternate	0,217	0,233	0,276	0,289	0,254	0,293	0,245	0,270
Tidore Kepulauan	0,200	0,227	0,251	0,239	0,257	0,222	0,205	0,227
Maluku Utara	0,304	0,319	0,335	0,332	0,315	0,324	0,280	0,286

*) Hasil Backcasting 2011-2013

- Gini ratio (koefisien gini) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Nilai Gini ratio ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini ratio, menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Gini ratio adalah 0 (nol), maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu), berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.
- Penghitungan Gini ratio menggunakan pendekatan data pengeluaran hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).



INDUSTRI MANUFAKTUR

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)

Tahun	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
2012	2,03	-	2,79	-	3,22	-	4,63	-
2013	2,16	13,40	2,54	13,13	2,04	11,83	1,33	8,31
2014	0,93	7,01	2,42	6,88	8,67	13,83	1,37	13,87
2015	4,88	15,53	5,42	21,79	-1,03	10,92	-2,17	7,05
2016	-0,69	1,37	-0,94	-0,80	-2,04	-2,71	0,68	-2,96

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil

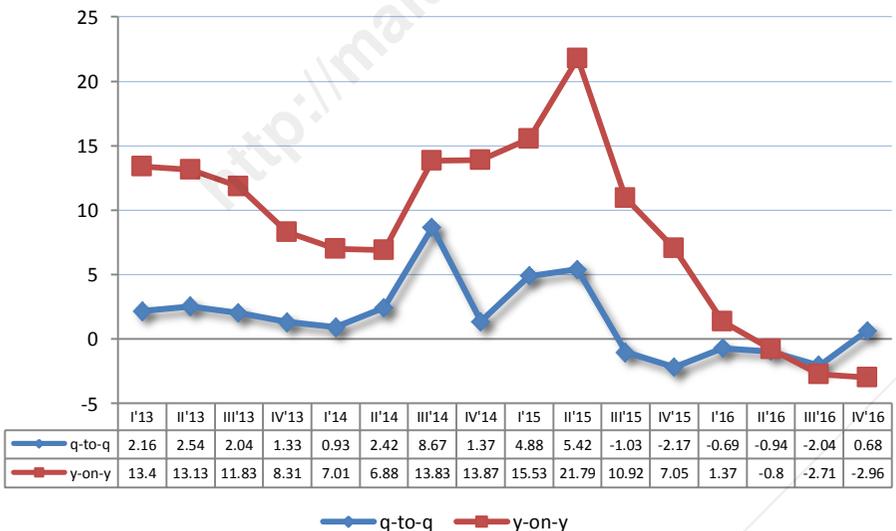
Kode KBLI	Jenis Industri	Triwulan III 2016		Triwulan IV 2016	
		q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Industri Makanan	4,00	20,98	-5,26	12,33
11	Industri Minuman	12,32	50,81	-2,97	28,54
14	Industri Pakaian Jadi	-17,47	34,13	39,83	50,24
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	17,48	23,74	10,86	21,72
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-17,40	32,94		
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	1,39	44,18	0,03	30,31
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-15,63	-2,22	36,81	31,77
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	6,82	48,21	18,90	55,61
31	Industri Furnitur	-12,38	-21,47	7,42	-15,03
	IMK (Industri Mikro dan Kecil)	0,01	24,87	8,41	25,56

- Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).
- Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak

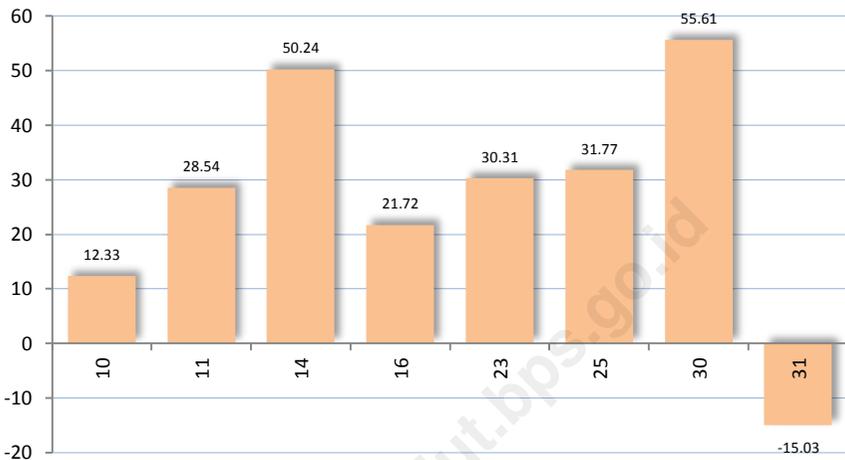
pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

- Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu: Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).
- Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.
- Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

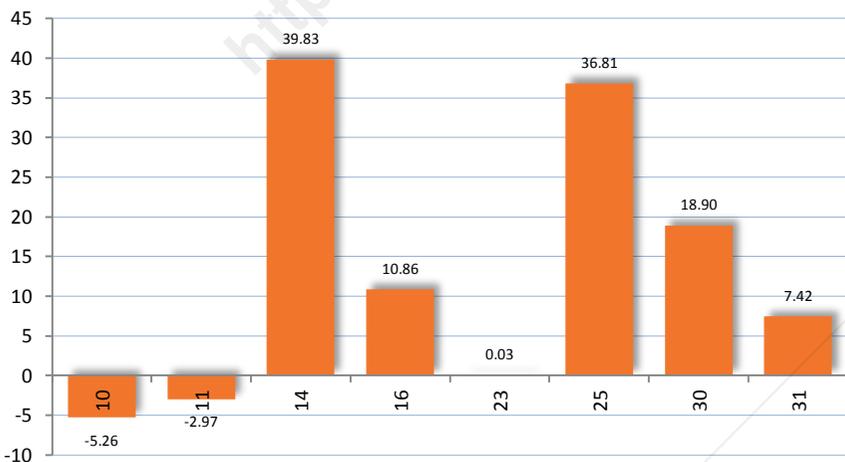
Perkembangan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulanan (y-on-y), Triwulan IV Tahun 2016, Menurut Jenis KBLI**



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulanan (q-to-q), Triwulan IV Tahun 2016, Menurut Jenis KBLI**



INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (%)

Kota Ternate dan Nasional

Bulan	Ternate				Nasional			
	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mar '16	127,64	0,28	-0,15	5,45	123,75	0,19	0,62	4,45
Apr '16	127,71	0,05	-0,09	4,86	123,19	-0,45	0,16	3,98
Mei '16	128,08	0,29	0,20	4,49	123,48	0,24	0,40	3,33
Jun '16	128,46	0,30	0,49	3,87	124,29	0,66	1,06	3,45
Jul '16	129,79	1,04	1,53	4,02	125,15	0,69	1,76	3,21
Ags '16	129,66	-0,1	1,43	2,31	125,13	-0,02	1,74	2,79
Sep '16	129,78	0,09	1,53	4,05	125,41	0,23	1,97	3,08
Okt '16	129,51	-0,21	1,31	2,89	125,59	0,14	2,11	3,31
Nov '16	129,85	0,26	1,58	3,14	126,18	0,47	2,59	3,58
Des '16	130,27	0,32	1,91	1,91	126,71	0,42	3,02	3,02
Jan '17	131,09	0,63	0,63	2,02	127,94	0,97	0,97	4,53
Peb '17	131,13	0,03	0,66	3,02	128,24	0,24	1,21	3,83
Mar '17	130,72	0,31	0,35	2,41	128,22	0,01	1,19	3,82

- Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
- Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.
- Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.
- *Year on year* adalah inflasi selama setahun dengan membandingkan IHK bulan tertentu pada tahun ke-n dengan IHK bulan yang sama pada tahun ke-(n-1).
- Cara menghitung inflasi bulan ke-n yaitu:

$$\left[\left(\frac{\text{IHK}(n)}{\text{IHK}(n-1)} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

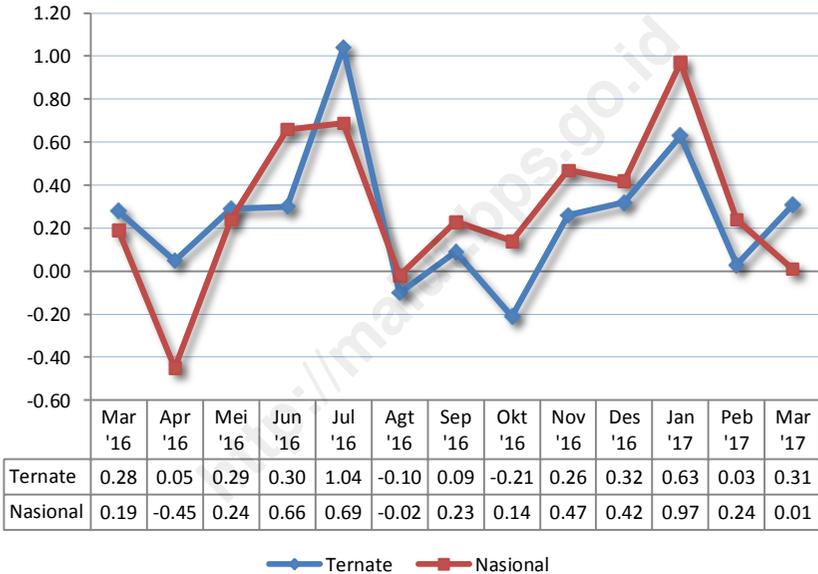
- Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012 = 100, dimana terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

baru (2012 = 100) dibandingkan IHK lama (2007 = 100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang.

- Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.
- Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Inflasi Bulanan Kota Ternate dan Nasional



EKSPOR DAN IMPOR

Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara

Bulan	Berat Bersih(kg)	Nilai(US \$)
(1)	(2)	(3)
Peb '16	-	-
Mar '16	11 250 397	6 897 175
Apr '16	-	-
Mei '16	-	-
Jun '16	-	-
Jul '16	11 600 000	6 832 864
Ags '16	7 556 860	6 429 376
Sep '16	-	-
Okt '16	7 500 000	6 703 425
Nov '16	-	-
Des '16	8 023 920	8 001 854
Jan '17	9 713 340	12 256 157
Peb '17	-	-

Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Komoditi (US \$)

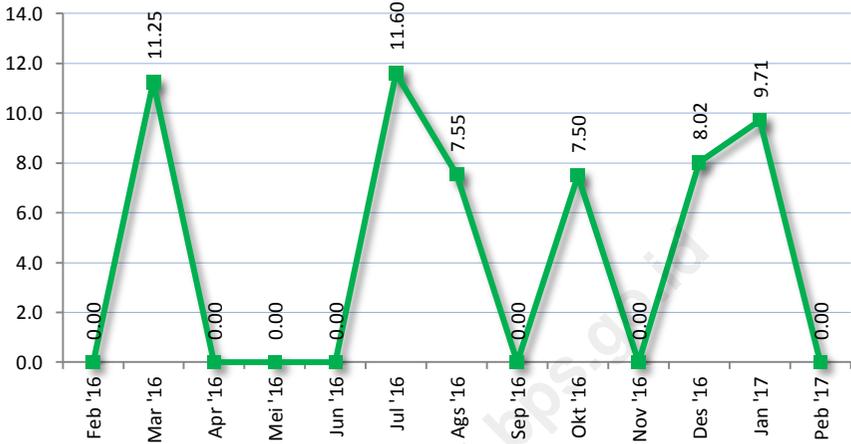
Bulan	Ferro-nickel	Other tube, pipes & hollow profile, seamless, unfinished drill pipe (green pipe)	Kopra dan Hasil Ekstraksinya	Alloy pig iron; spiegeleisen	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peb '16	-	-	-	-	-
Mar '16	-	-	442 207	6 454 968	6 897 175
Apr '16	-	-	-	-	-
Mei '16	-	-	-	-	-
Juni '16	-	-	-	-	-
Juli '16	-	-	-	6 832 864	6 832 864
Ags '16	-	-	-	6 429 376	6 429 376
Sep '16	-	-	-	-	-
Okt '16	-	-	-	6 703 425	6 703 425
Nov '16	-	-	-	-	-
Des '16	8 001 854	-	-	-	8 001 854
Jan '17	12 247 059	9 098	-	-	12 256 157
Peb '17	-	-	-	-	-

Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Impor Provinsi Maluku Utara

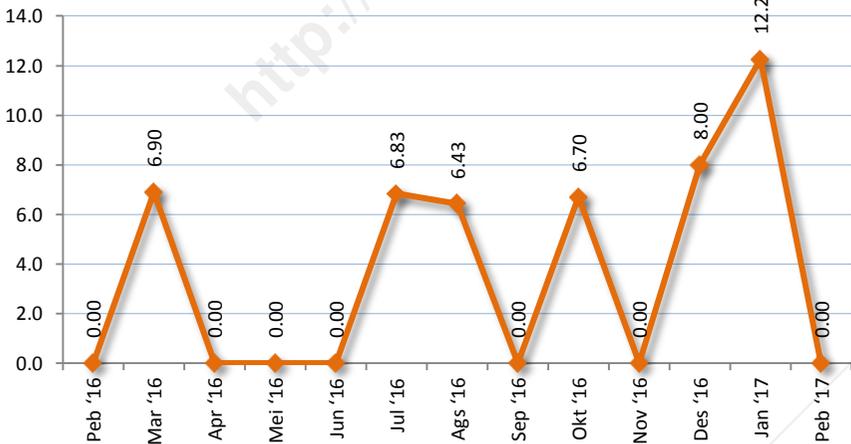
Bulan	Berat Bersih(kg)	Nilai(US \$)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Peb '16	30 903 388	36 089 345
Mar '16	41 221 718	18 033 081
Apr '16	9 775 796	7 790 053
Mei '16	24 424 395	13 972 686
Juni '16	22 029 869	45 820 101
Juli '16	44 286 712	7 192 647
Ags '16	45 443 747	5 354 160
Sep '16	75 824 920	59 588 053
Okt '16	31 291 127	10 087 951
Nov '16	1 831 583	3 322 055
Des '16	24.505.424	21.536.896
Jan '17	14 132 841	7 636 919
Peb '17	2 112 566	1 747 199

- Ekspor meliputi seluruh barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial seperti bantuan kredit lunak, hadiah dan sebagainya.
- Ekspor kapal laut dan pesawat udara termasuk dalam statistik ekspor sedangkan ekspor bunker oil untuk kapal tidak tercatat.
- Data ekspor dikumpulkan berdasarkan dokumen ekspor/pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang diisi oleh eksportir dan telah diberikan ijin muat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dan selanjutnya dikirim ke BPS.
- Impor meliputi seluruh barang-barang yang masuk ke wilayah kepabeanaan Indonesia.
- Data impor dikumpulkan berdasarkan dokumen impor/Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir.

**Perkembangan Volume Ekspor Maluku Utara
(ribu ton)**



**Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara
(juta US\$)**



NILAI TUKAR PETANI

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara

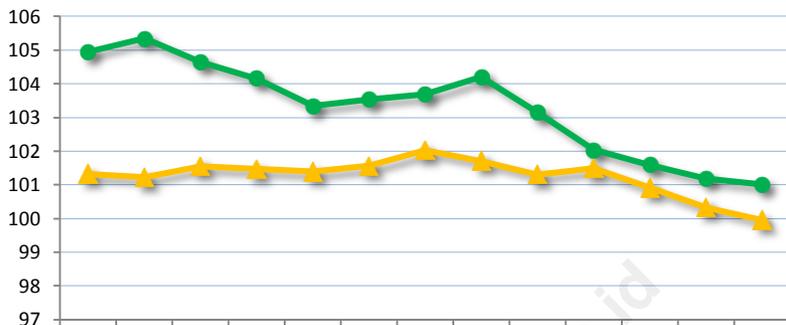
Bulan	NTP Per Sub Sektor					NTP Malut	NTP Nasional
	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mar 2016	108,60	111,06	98,77	109,57	101,54	104,94	101,32
Apr 2016	109,62	109,55	99,98	109,57	101,94	105,34	101,22
Mei 2016	108,18	107,94	100,15	109,10	100,79	104,64	101,55
Jun 2016	108,28	109,35	98,24	108,52	101,20	104,15	101,47
Jul 2016	108,22	107,54	96,72	109,04	102,51	103,34	101,39
Agst 2016	109,86	105,58	97,18	109,22	103,29	103,54	101,56
Sep 2016	110,48	106,25	96,31	111,38	102,15	103,68	102,02
Okt 2016	110,73	108,04	96,83	111,01	101,38	104,20	101,71
Nov 2016	111,00	107,49	94,77	109,56	101,37	103,15	101,31
Des 2016	109,84	107,23	92,56	109,21	102,66	102,04	101,49
Jan 2017	108,27	107,64	92,37	107,86	103,55	101,59	100,91
Peb 2017	106,69	107,48	92,51	106,89	104,11	101,19	100,33
Mar 2017	106,83	106,85	92,46	106,47	104,04	101,01	99,95

Perkembangan Inflasi Perdesaan Maluku Utara dan Nasional

Bulan	Inflasi Perdesaan Maluku Utara	Inflasi Perdesaan Nasional
(1)	(2)	(3)
Mar 2016	0.11	0.95
Apr 2016	0.33	-0.5
Mei 2016	0.16	0.13
Jun 2016	1.06	0.59
Jul 2016	0.71	0.76
Agst 2016	0.99	0.06
Sep 2016	-0.18	0.32
Okt 2016	-0.16	0.04
Nov 2016	0.93	0.87
Des 2016	0.68	0.42
Jan 2017	1,11	0,79
Peb 2017	0,05	0,38
Mar 2017	0,43	-0,10

- Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
- Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian diperdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.
- NTP terdiri dari 5 (lima) sub-sektor, yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), Peternakan dan Perikanan.
- Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.
- Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.
- Nilai tukar petani (NTP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani.
- Cara penghitungan NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dikalikan seratus.
- Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT) merupakan bagian dari indeks yang dibayar oleh petani untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga.
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meliputi sub kelompok antara lain: bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan rekreasi & olah raga serta transportasi dan komunikasi.
- Perubahan nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga lebih dikenal sebagai Inflasi Perdesaan.

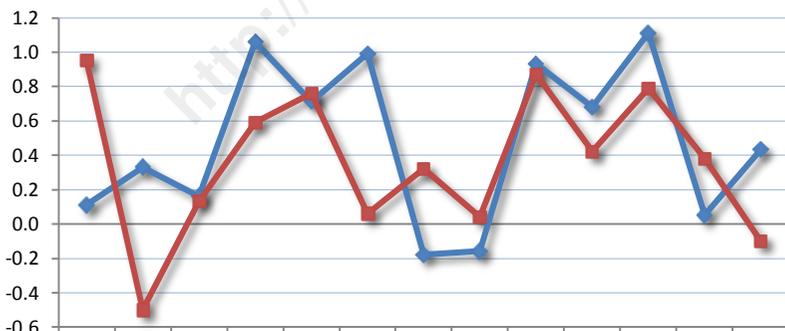
Perkembangan Nilai Tukar Petani



	Mar '16	Apr '16	Mei '16	Jun '16	Jul '16	Agst '16	Sept '16	Okt '16	Nov '16	Des '16	Jan '17	Peb '17	Mar '17
Malut	104.9	105.3	104.6	104.1	103.3	103.5	103.6	104.2	103.1	102.0	101.5	101.1	101.0
Nasional	101.3	101.2	101.5	101.4	101.3	101.5	102.0	101.7	101.3	101.4	100.9	100.3	99.95

● Malut ▲ Nasional

Perkembangan Inflasi Perdesaan



	Mar '16	Apr '16	Mei '16	Jun '16	Jul '16	Agst '16	Sept '16	Okt '16	Nov '16	Des '16	Jan '17	Peb '17	Mar '17
Malut	0.11	0.33	0.16	1.06	0.71	0.99	-0.18	-0.16	0.93	0.68	1.11	0.05	0.43
Nasional	0.95	-0.50	0.13	0.59	0.76	0.06	0.32	0.04	0.87	0.42	0.79	0.38	-0.10

◆ Malut ■ Nasional

PARIWISATA

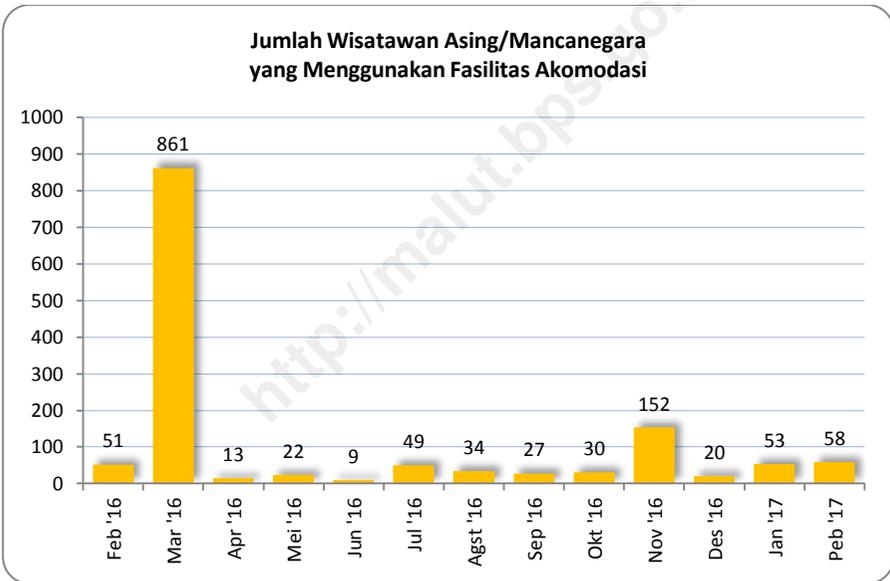
Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi Provinsi Maluku Utara

Bulan	Wisatawan Asing/Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Feb '16	51	9 864	9 915
Mar '16	861	11 125	11 986
Apr '16	13	9 770	9 783
Mei '16	22	12 237	12 259
Jun '16	9	10 547	10 556
Jul '16	49	10 899	10 948
Agst '16	34	12 518	12 552
Sep '16	27	12 527	12 554
Okt '16	30	12 708	12 738
Nov '16	152	13 524	13 676
Des '16	20	15 576	15 596
Jan '17	53	12 275	12 328
Peb '17	58	13 277	13 335

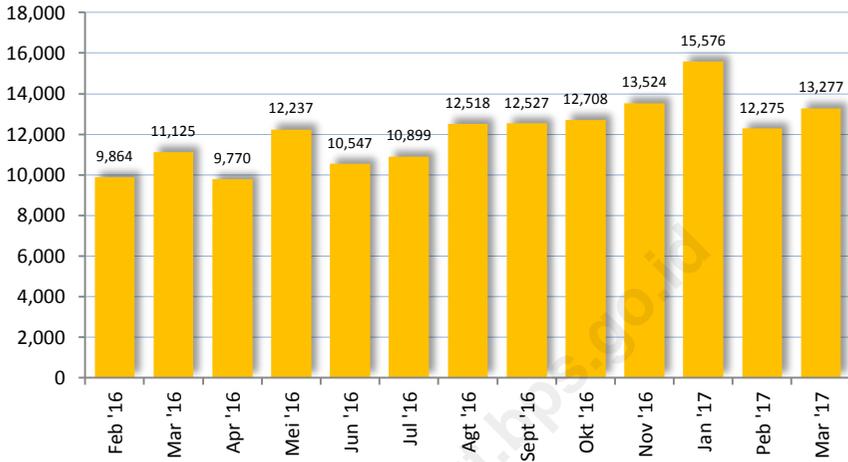
Tingkat Penghunian Kamar Provinsi Maluku Utara

Bulan	Malam Kamar Tersedia	Malam Kamar Terjual	TPK
(1)	(2)	(3)	(4)
Feb '16	49 619	20 961	42,24
Mar '16	53 847	24 826	46,10
Apr '16	48 840	19 737	40,41
Mei '16	50 437	20 447	40,53
Jun '16	51 390	17 149	33,37
Jul '16	51 739	18 536	35,83
Agst '16	52 328	26 180	50,03
Sep '16	50 010	19 107	38,20
Okt '16	52 793	19 784	37,47
Nov '16	50 790	20 090	39,55
Des '16	51 739	19 023	36,76
Jan '17	57 784	17 555	30,38
Peb '17	56 702	18 193	32,09

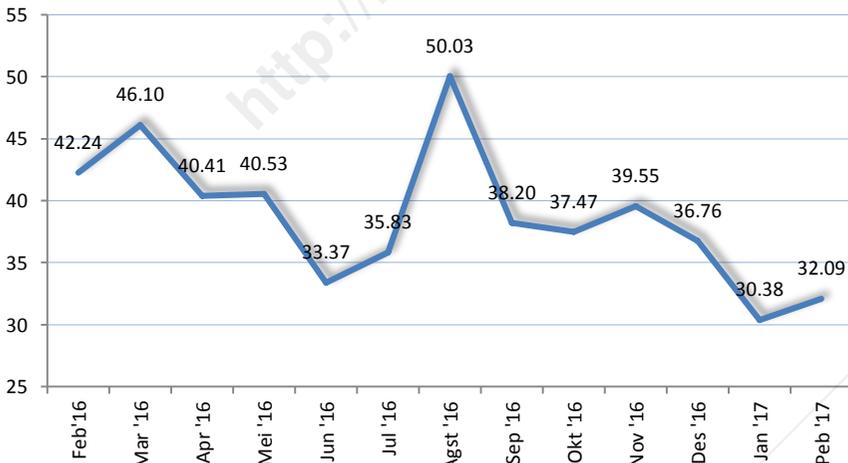
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikali 100 persen.
- Tingkat Pemakaian Tempat Tidur adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya malam tempat tidur yang tersedia dikali 100 persen.
- Rata-rata Lamanya Tamu Menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap di akomodasi.
- Rata-rata Tamu Per Kamar (GPR) adalah perbandingan antara banyaknya malam tamu atau malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar yang dihuni.
- Keterangan:
 - 1 malam kamar = 1 kamar x 1 malam
 - 1 malam tempat tidur = 1 tempat tidur x 1 malam
 - 1 malam tamu = 1 tamu x 1 malam



Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi



Tingkat Penghunian Kamar



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan			
		I 2016	II 2016	III 2016	IV 2016
(1)	(2)	(5)	(6)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1738,4	1820,2	1875,2	1845,6
B	Pertambangan dan Penggalian	568,1	572,2	643,6	662,0
C	Industri Pengolahan	375,7	379,7	415,1	401,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,5	6,7	6,7	6,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,8	6,0	5,9	6,0
F	Konstruksi	464,5	472,1	479,1	508,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1230,7	1268,7	1327,5	1320,5
H	Transportasi dan Pergudangan	422,4	442,3	469,3	476,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,7	32,3	33,4	34,5
J	Informasi dan Komunikasi	262,5	263,6	276,6	280,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	218,4	228,8	230,0	245,9
L	Real Estate	8,2	8,3	8,4	8,6
M,N	Jasa Perusahaan	22,6	23,0	23,9	24,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1117,5	1207,1	1169,6	1265,5
P	Jasa Pendidikan	249,5	254,2	279,4	285,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,7	151,5	155,5	160,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	56,2	56,9	58,2	58,9
PDRB		6923,3	7193,3	7457,5	7591,2

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha(milyar rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		I 2016	II 2016	III 2016	IV 2016
(1)	(2)	(6)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1190,8	1233,9	1265,6	1252,2
B	Pertambangan dan Penggalian	489,1	484,1	519,8	530,5
C	Industri Pengolahan	301,8	304,9	334,2	320,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	6,1	5,7	5,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,8	5,0	4,9	5,0
F	Konstruksi	348,0	353,2	357,3	378,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	944,4	971,3	1003,6	997,1
H	Transportasi dan Pergudangan	297,2	308,5	321,3	322,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,6	24,2	24,9	25,5
J	Informasi dan Komunikasi	236,1	235,4	245,9	246,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161,3	167,7	166,8	175,8
L	Real Estate	6,3	6,4	6,5	6,6
M,N	Jasa Perusahaan	18,0	18,2	18,8	18,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	813,9	878,4	846,8	914,6
P	Jasa Pendidikan	179,4	182,2	191,1	193,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,6	116,5	119,2	120,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	44,6	45,1	46,2	46,5
PDRB		5176,4	5341,0	5478,5	5560,5

Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persentase)

Kategori	Uraian	Tw III-16	Tw IV-16	Tw IV16	Sumber Pertum buhan 2016
		terhadap Tw II-16	terhadap Tw III-16	terhadap Tw IV15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,57	-1,06	7,65	0,99
B	Pertambangan dan Penggalian	7,39	2,05	7,60	-0,16
C	Industri Pengolahan	9,63	-4,08	17,11	0,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,15	1,38	3,29	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,32	2,10	3,09	0,01
F	Konstruksi	1,16	5,80	6,03	0,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,32	-0,64	7,61	1,26
H	Transportasi dan Pergudangan	4,14	0,44	10,07	0,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,12	2,15	9,12	0,05
J	Informasi dan Komunikasi	4,43	0,37	8,30	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,54	5,43	11,21	0,38
L	Real Estate	1,80	1,19	4,97	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	2,95	0,15	5,17	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,60	8,01	-1,01	0,56
P	Jasa Pendidikan	4,87	1,19	3,31	0,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,38	1,21	5,12	0,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,30	0,67	7,13	0,08
PDRB		2,57	1,50	6,54	5,77

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)

Komponen	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
	I 2016	II 2016	III 2016	IV 2016
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 082,7	4 184,5	4 343,7	4 370,3
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	83,5	86,0	88,2	89,0
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 145,2	2 344,5	2 320,2	2 936,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 950,3	2 021,2	2 064,1	2 108,7
5. Perubahan Inventori	89,0	179,4	-19,9	7,3
6. Ekspor Luar Negeri	102,6	12,2	183,8	210,2
7. Impor Luar Negeri	729,6	778,6	967,3	482,5
8. Net Ekspor Antar Daerah	-800,4	-856,0	-555,4	-1 648,3
PDRB	6 923,3	7 193,3	7 457,5	7 591,2

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)

Komponen	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 082,5	3 133,5	3 193,8	3 196,9
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	63,7	64,9	66,4	66,9
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 499,6	1 629,9	1 602,7	2 007,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 524,4	1 552,8	1 578,1	1 596,2
5. Perubahan Inventori	56,0	111,9	-12,3	4,5
6. Ekspor Luar Negeri	97,1	9,2	178,2	172,6
7. Impor Luar Negeri	573,1	616,4	699,7	384,6
8. Net Ekspor Antar Daerah	-573,8	-544,9	-428,8	-1 099,6
PDRB	5 176,4	5 341,0	5 478,5	5 560,5

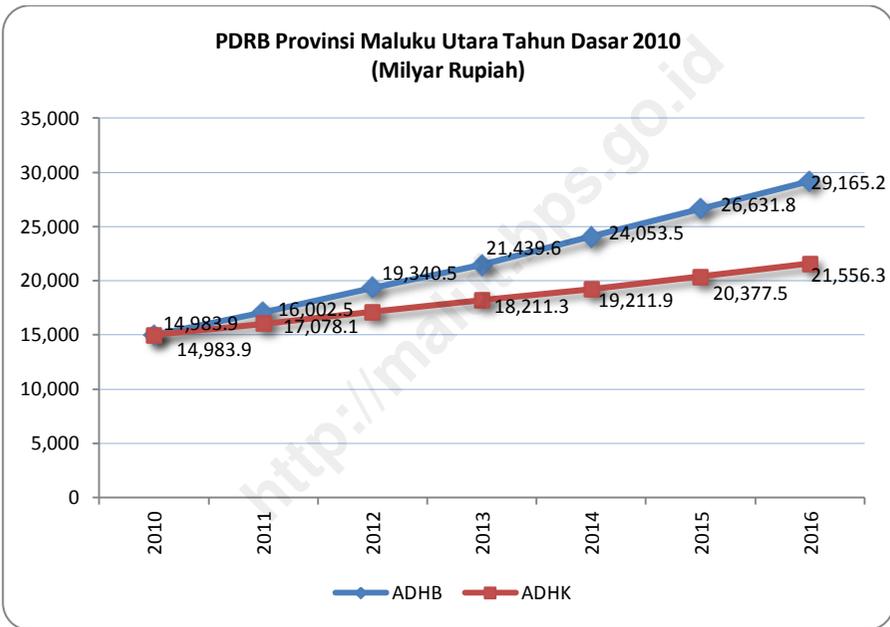
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Tahun Dasar 2010, milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	1311,25	1463,99	14 761,0
Halmahera Tengah	1330,12	1401,07	31 370,5
Kepulauan Sula	1409,48	1588,97	18 812,0
Halmahera Selatan	3163,96	3667,59	18 226,6
Halmahera Utara	3288,19	3718,85	22 893,6
Halmahera Timur	2206,46	2102,03	27 283,5
Pulau Morotai	855,56	958,14	17 905,2
Pulau Taliabu	767,30	864,03	19 125,4
Ternate	5422,28	6235,20	33 295,2
Tidore Kepulauan	1636,04	1869,69	21 615,3

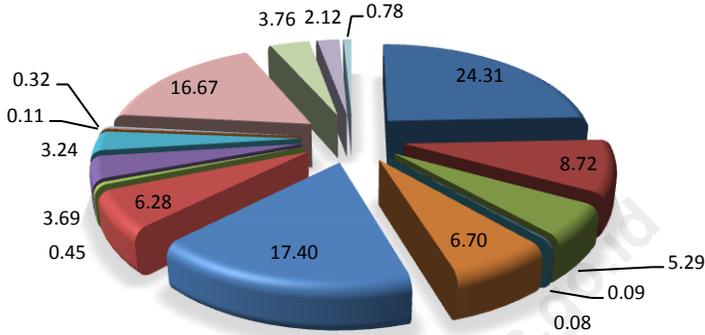
- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu.
- PDRB dihitung berdasarkan:
 1. Atas dasar harga berlaku (ADHB), Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
 2. Atas dasar harga konstan (ADHK), Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu sebagai dasar.
- Pendekatan yang digunakan dalam penghitungan PDRB ada 3 macam, yaitu:

Produk Domestik Regional Bruto

1. Pendekatan Produksi, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu tertentu.
2. Pendekatan Pendapatan, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi (FP) yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
3. Pendekatan Pengeluaran, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (unit institusi). Pengeluaran yang dimaksud diistilahkan sebagai permintaan akhir.



Struktur PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2016



- A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B - Pertambangan dan Penggalian
- C - Industri Pengolahan
- D - Pengadaan Listrik dan Gas
- E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F - Konstruksi
- G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H - Transportasi dan Pergudangan
- I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Indeks Tendensi Konsumen Menurut Variabel Pembentuknya

Variabel Pembentuk	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016
	(1)	(4)	(5)	(4)
Pendapatan rumah tangga	101,27	110,78	107,15	105,14
Pengaruh inflasi terhadap total pengeluaran rumah tangga	100,35	101,02	90,47	98,44
Volume/frekuensi konsumsi barang/jasa	98,65	116,26	99,09	99,09
Indeks Tendensi Konsumen	100,45	109,30	100,87	103,05

- Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK).
- ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.
- Responden STK merupakan sub-sampel dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) khusus di daerah perkotaan.
- Pemilihan sampel dilakukan secara panel antar triwulan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan persepsi konsumen antar waktu.
- Nilai ITK Provinsi Maluku Utara pada Triwulan I-2017diperkirakan sebesar 104,70, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dari triwulan sebelumnya. Angka tersebut menggambarkan tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV-2016 (nilai ITK sebesar 103,05).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia dan Peringkat Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Halmahera Barat	60,71	61,47	62,06	62,97	63,83	5	5	5	5	5
Halmahera Tengah	59,94	60,89	61,49	62,07	63,05	6	6	6	6	6
Kepulauan Sula	58,83	59,77	60,18	60,50	61,25	8	8	8	8	8
Halmahera Selatan	59,50	59,92	60,34	61,26	62,17	7	7	7	7	7
Halmahera Utara	62,94	63,81	64,18	65,04	66,02	3	3	3	3	3
Halmahera Timur	61,73	62,71	63,26	63,99	64,92	4	4	4	4	4
Pulau Morotai	57,16	57,97	58,34	59,27	59,87	9	9	9	9	9
Pulau Taliabu	-	56,86	57,31	58,26	58,66	-	10	10	10	10
Ternate	75,81	76,69	77,15	77,64	77,80	1	1	1	1	1
Tidore Kepulauan	65,42	66,25	66,76	67,45	68,37	2	2	2	2	2
Maluku Utara	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	27	27	27	27	27

Keterangan: Peringkat kabupaten/kota berdasarkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sedangkan peringkat provinsi berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia

Komponen Pembentuk IPM Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (RP 000)							
	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)			
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	65,35	65,45	12,61	13,05	7,77	7,86	6 889	7 076
Halmahera Tengah	62,40	62,60	12,29	12,70	7,85	8,14	7 359	7 481
Kepulauan Sula	62,39	62,50	11,83	12,23	7,95	7,96	6 545	6 741
Halmahera Selatan	65,03	65,11	11,91	12,31	7,15	7,42	6 791	6 894
Halmahera Utara	68,77	68,86	12,69	13,06	8,06	8,35	6 957	7 110
Halmahera Timur	67,49	67,67	12,09	12,48	7,57	7,77	7 41	7 560
Pulau Morotai	65,98	66,13	11,59	11,92	6,84	6,88	5 809	5 888
Pulau Taliabu	61,08	61,20	11,48	11,73	7,41	7,42	6 158	6 208
Ternate	70,07	70,17	15,05	15,06	11,12	11,13	12 529	12 643
Tidore Kepulauan	68,43	68,54	13,27	13,74	8,91	9,11	7 631	7 772
Maluku Utara	67,44	67,51	13,10	13,45	8,37	8,52	7 423	7 545

Indeks Pembangunan Manusia

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).
- IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) Pengetahuan (*knowledge*); dan 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).
- IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.
- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity - PPP*).

- Persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

dimana:

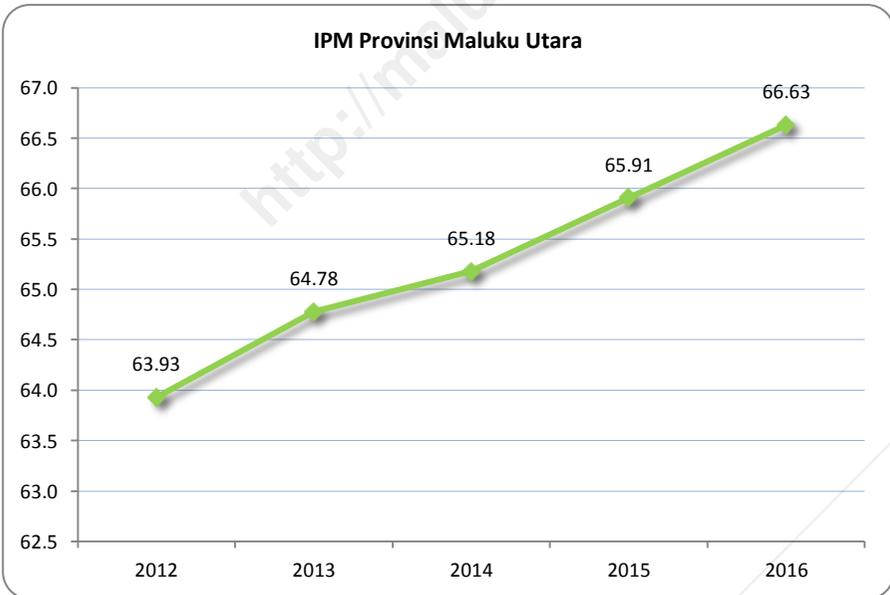
$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara

Tahun	Indeks Pembangunan Gender
(1)	(2)
2010	85,29
2011	85,31
2012	87,06
2013	87,96
2014	88,79
2015	88,86

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender.
- Sebelum menghitung IPG, dihitung terlebih dahulu pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata (X_{ede}).
- Cara penghitungan IPG:

$$IPG = \frac{X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis}}{3}$$

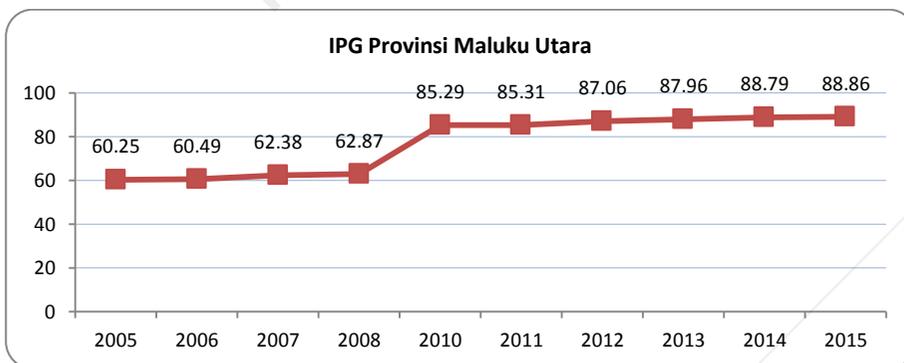
$$X_{ede} = \left(P_f X_f^{(1-\epsilon)} + P_m X_m^{(1-\epsilon)} \right)^{1/(1-\epsilon)}$$

dimana:

$X_{ede(1)} = X_{ede}$ untuk harapan hidup

$X_{ede(2)} = X_{ede}$ untuk pendidikan

$I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan



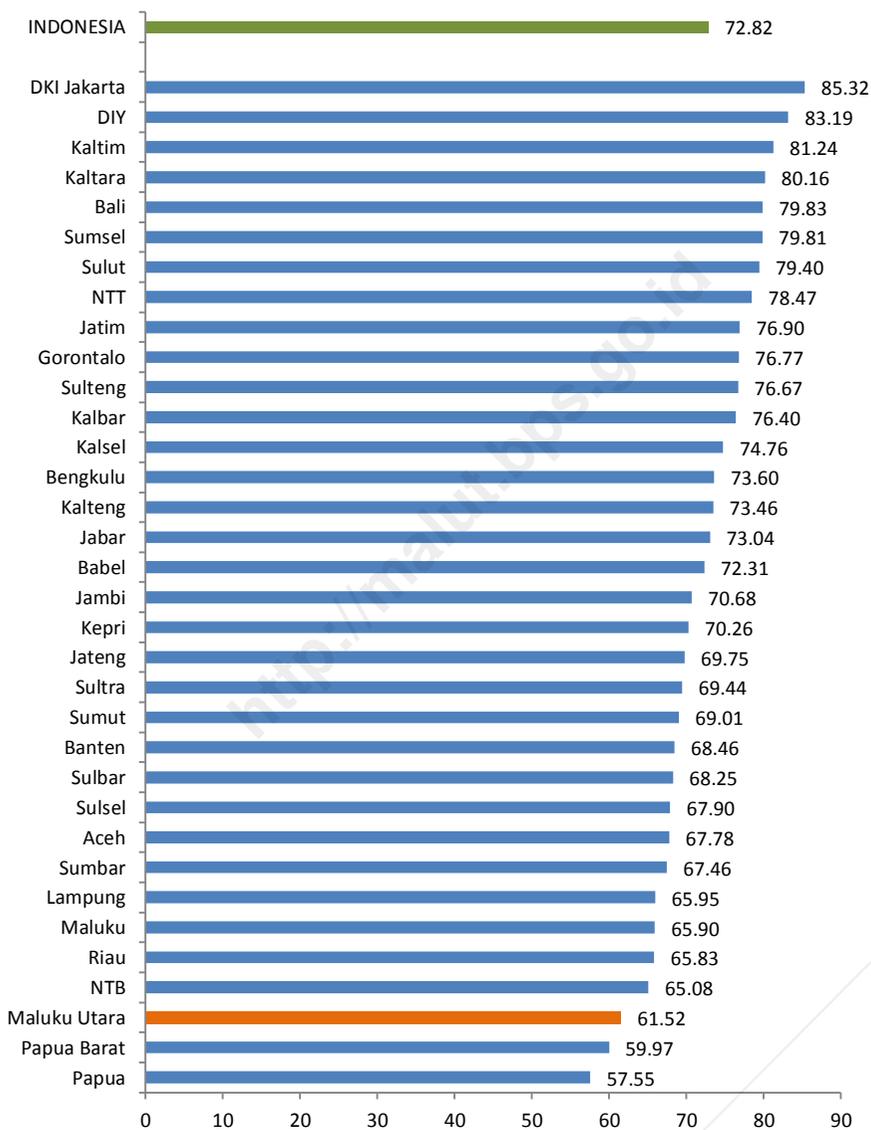
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Aspek dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara

Aspek Demokrasi	Capaian 2010	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Capaian 2015
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Kebebasan Sipil	92,59	90,04	88,15	83,67	76,90	73,53
II. Hak-Hak Politik	30,82	32,61	50,13	48,94	60,61	61,00
III. Lembaga Demokrasi	65,06	62,56	66,55	63,40	68,16	47,25
Indeks Keseluruhan	59,92	59,17	66,83	64,06	67,90	61,52

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi.
- Aspek demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI adalah:
 1. Kebebasan sipil (*civil liberties*)
 2. Hak-hak politik (*political rights*)
 3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*)
- Tiga aspek demokrasi tersebut terbagi menjadi 11 variabel yang terbagi lagi menjadi 28 indikator.
- Manfaat IDI yaitu:
 1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
 2. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
 3. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Menurut Peringkat



<http://malut.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No 65, Ternate

Telp: (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id>, Email: malut@bps.go.id